



MULTIKULTURALISME DAN IDENTITAS KEBANGSAAN

ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL
SERI 10 (2018)

Analisis Hubungan Internasional merupakan esai sebagai bentuk respon atau pemikiran dalam mengamati isu-isu kontemporer hubungan internasional terkini.

hi.fisip.unsoed.ac.id

[@hiunsoed](https://www.instagram.com/hiunsoed)

Pada salah satu dokumentasi aksi kelompok supremasi kulit putih yang sempat berlangsung di Amerika Serikat (AS) untuk menentang rencana pemerintah kota Charlottesville pembongkaran dan pemindahan patung Robert E. Lee, terlihat kelompok pendemo yang meneriakkan kata-kata “*blood and soil*”, “darah dan tanah”.

Frasa yang sama digunakan sebagai slogan oleh Nazi Jerman selama 1930-an dan 1940-an, dan hingga kini diadopsi oleh kelompok-kelompok gerakan ultra-kanan (Pitcavage, 2017, dikutip oleh *New York Times*). Walaupun kelompok tersebut tidak bisa dikatakan mewakili seluruh peserta aksi, kehadiran mereka memper-tegas keberadaan kelompok fasis di Amerika Serikat. Secara keseluruhan, rangkaian aksi ini menggambarkan gerakan supremasi kulit putih di Amerika Serikat.

Laporan *New York Times* (2017) yang berjudul *How far is Europe swinging to the Right?* menunjukkan bahwa dukungan terhadap partai-partai sayap kanan (mulai dari partai nasionalis dan populis hingga neo-fasis) mulai meningkat. Mengapa gerakan intoleran semacam ini bisa menguat kembali? Terutama bila kita melihat bahwa di antara negara-negara tersebut adalah negara yang, seperti halnya Amerika Serikat, menerapkan kebijakan multikulturalisme? Sebelumnya, perlu dijelaskan terlebih dulu mengenai multikulturalisme.

Kebijakan multikulturalisme, menurut Vertovec (2010) merujuk pada kebijakan yang terdiri atas aturan-aturan yang mengakomodasi perbedaan dalam masyarakat, misalnya dengan pengakuan budaya, diijinkannya praktek budaya, hingga disediakan fasilitas untuk praktek agama atau budaya tertentu di ruang publik. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah suatu kebijakan integrasi melalui toleransi. Negara-negara yang menerapkannya antara lain adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Swedia dan Belanda.

Kelemahan praktek multikulturalisme, menurut para akademisi, adalah multikulturalisme akhirnya menciptakan masyarakat yang terkotak-kotakkan. Tujuan integrasi para pendatang yang memiliki budaya berbeda dalam kehidupan lokal tidak tercapai. Lebih jauh, masalah rasisme, fasisme, dan diskriminasi terhadap minoritas yang ingin dibereskan justru masih bertahan (Vertovec, 2010).

MULTIKULTURALISME DAN IDENTITAS KEBANGSAAN

ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL
SERI 10 (2018)

Bila dilihat dari sisi ekonomi, semangat identitas dan gerakan-gerakan kanan belakangan ini dapat dikatakan sebagai hasil dari diabaikannya kondisi kesenjangan ekonomi yang menjadikan adanya kelompok masyarakat terus hidup dalam kemiskinan. Zizek (2008) mempertanyakan hal itu dalam *Violence*: “Mengapa sangat banyak permasalahan pada hari ini dikaitkan dengan intoleransi dan bukan-nya kesenjangan, eksploitasi atau ketidakadilan? Mengapa penyelesaian yang ditawarkan hanyalah toleransi, bukannya emansipasi, perjuangan politik atau bahkan perlawanan bersenjata?” Dengan demikian, penjelasan budaya atau “kulturalisasi politik” menyebabkan negara tidak menelusuri akar dari permasalahan ekonomi dengan serius (Zizek, 2008). Padahal, keberadaan rasisme dan fasisme tidak bisa dijelaskan semata karena kegagalan masyarakat mentoleransi perbedaan, namun juga karena kegagalan negara mensejahterakan warga negaranya.

Permasalahan kemiskinan kemudian dapat berujung pada hilangnya kepercayaan pada politisi, bahkan pada politik. Untuk Amerika Serikat, masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi masyarakat kulit hitam, Latin atau Asia, namun juga kelas pekerja kulit putih. Maka, warisan rezim Demokrat adalah hilangnya kepercayaan pada politik; hampir semua kelompok merasa dirugikan akibat menurunnya lapangan pekerjaan di bidang manufaktur, berkurangnya perwakilan Serikat, dan berkurangnya dana bantuan kota (Moody, 2016; Purdy, 2016). Dengan latar belakang inilah Trump memenangkan pemilu Amerika Serikat, yang mana ia muncul bukan sebagai politisi, namun sebagai pengusaha.

Namun, dengan meminjam kata kunci ekonomi, bukan berarti Trump betul-betul berbicara untuk menyelamatkan kelas pekerja. Ia tidak sedang mengganti multikulturalisme dengan membuka ruang emansipasi karena ada kata kunci lain yang dipergunakannya, yakni “*They are taking our jobs*”. Hal itu menegaskan bahwa masalah ekonomi ini terjadi karena ada orang yang tidak berhak sedang mengambil dari orang yang berhak.

Berangkat dari pemilihan yang dimainkan dengan cara ini, Trump kemudian membuka jalan bagi tampilnya rasisme dan fasisme di Amerika Serikat. Apakah itu kebijakan deportasi imigran ilegal ‘bermasalah’, pengetatan patroli di perbatasan, dan diteruskannya rencana membangun dinding Meksiko-Amerika Serikat, ataupun pelarangan imigrasi untuk negara Muslim, Trump mempertegas retorika bahwa Amerika adalah negara bangsa milik “orang Amerika” belaka.

Nurul Azizah Zayzda
Dosen Hubungan Internasional